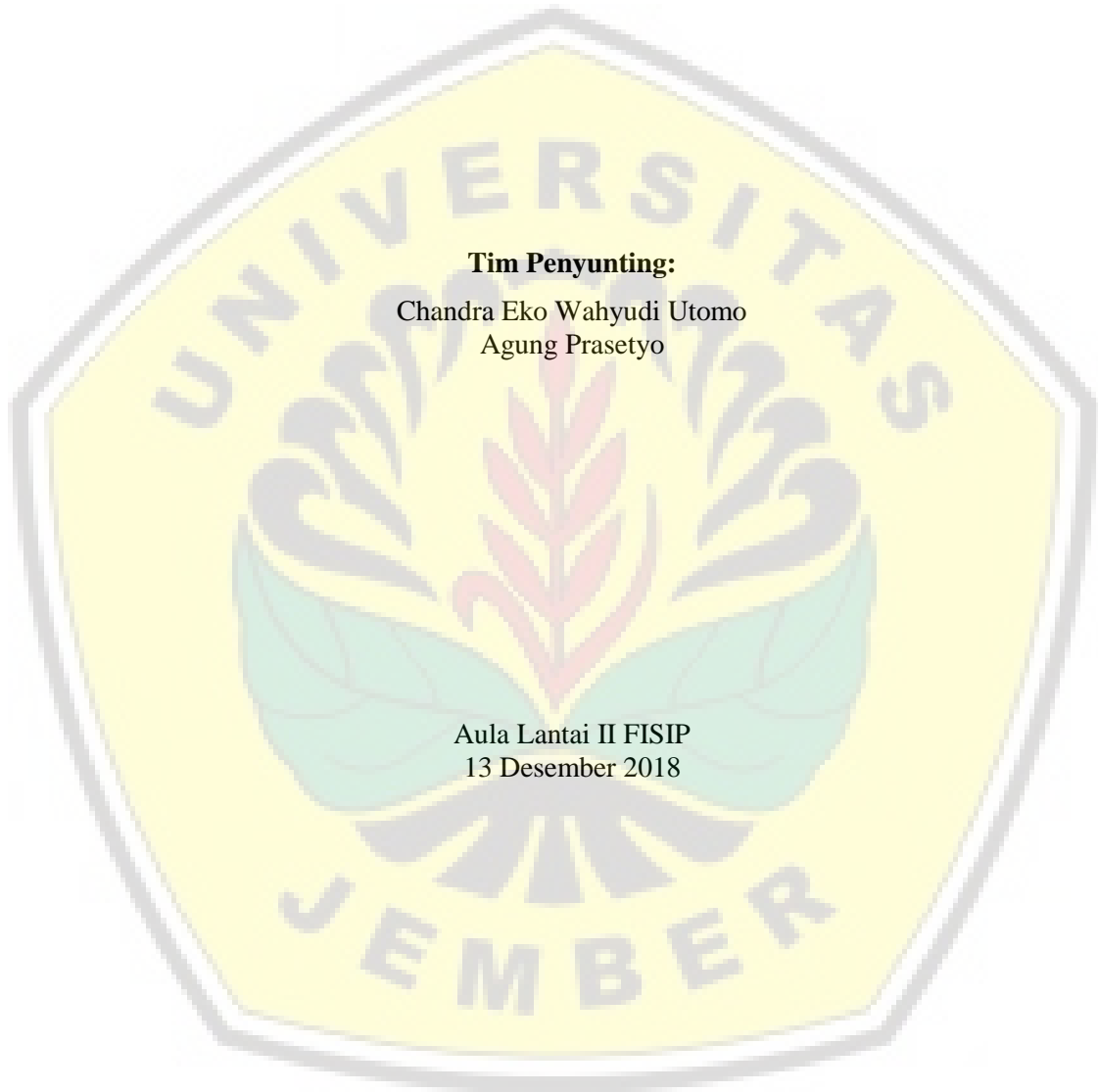


PROSIDING

**PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN:
INOVASI, TEKNOLOGI DAN KEARIFAN LOKAL**



Tim Penyunting:

Chandra Eko Wahyudi Utomo
Agung Prasetyo

Aula Lantai II FISIP
13 Desember 2018

**UPT PERCETAKAN DAN PENERBIT
UNIVERSITAS JEMBER**

**PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN:
INOVASI, TEKNOLOGI DAN KEARIFAN LOKAL**

Penyunting:

Chandra Eko Wahyudi Utomo

Agung Prasetyo

ISBN : 978-602-5617-



All rights reserved. Except for the quotation of short passage for the purposes of criticism and review, no part of this book may be reproduced in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of the publisher

Kata Pengantar

Dewasa ini pariwisata telah dikembangkan secara besar-besaran untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Pilihan tersebut disebabkan karena pariwisata adalah industri yang unik, yaitu bahwa wisatawan sebagai pelanggan mendatangi produk, sulit diproteksi dan sulit dibatasi oleh kepentingan apapun, mendatangkan devisa serta membuka kesempatan kerja yang luas. Pada tahun 2007 tercatat hampir 1 miliar wisatawan mengunjungi berbagai objek wisata di seluruh penjuru dunia, dengan pengeluaran lebih dari 750 juta US\$, dan menciptakan sekitar 193 juta kesempatan kerja.

Pengembangan pariwisata telah mengalami berbagai proses perubahan yang disebabkan oleh kondisi eksternal maupun internal. Pengalaman di berbagai negara di mana pariwisata dikembangkan secara besar-besaran menunjukkan timbulnya berbagai dampak, seperti menurunnya kualitas kehidupan sosial-budaya dan lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Oleh karenanya muncul tanggapan serius dari berbagai kalangan terhadap pengembangan kepariwisataan dunia. Badan Turisme Dunia (WTO) telah mengarahkan bahwa pengembangan pariwisata dunia harus ditujukan pada peningkatan kualitas hidup baik untuk wisatawan, pelaku bisnis wisata, dan masyarakat khususnya yang berada di sekitar lokasi objek wisata.

Pada tatanan global, pariwisata dihadapkan pada berbagai tuntutan, seperti;

- liberalisasi perdagangan yang memicu persaingan global
- standar kualitas profesionalisme
- apresiasi masyarakat dunia terhadap hak asasi manusia
- perlindungan atas hak-hak pelanggan
- pelaksanaan nilai-nilai dalam kode etik pariwisata dunia (the global code of ethic for tourism)
- pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab
- meningkatkan kualitas hidup

Berkaitan dengan berbagai tuntutan tersebut, maka diperlukan keterlibatan secara koordinatif dari para stakeholder pariwisata dengan mengutamakan prinsip berkelanjutan, memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat setempat secara terpadu.

Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) sekarang dikenal sebagai sebuah pendekatan esensial untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tanpa menghabiskan sumberdaya alam dan budaya atau penurunan kualitas lingkungan. Pada United Conference on Environment and Development yang dikenal dengan Earth Summit di Rio de Janeiro Juni 1992, menyarankan agar konsep pembangunan berkelanjutan harus menjadi sebuah ideologi di semua aspek pembangunan, termasuk pariwisata. Badan Turisme Dunia atau World Tourism Organization (WTO) mengharapkan agar pengembangan industri pariwisata di mana pun harus berpijak dan diselaraskan pada pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi sebuah komitmen dari masyarakat pariwisata dunia sebagai tanggung jawab dunia pariwisata terhadap kelestarian lingkungan, karena pengembangan pariwisata diharapkan dapat memberi keuntungan substansial bagi masyarakat luas yang meliputi:

- Pekerjaan dan bisnis baru
- Tambahan pendapatan
- Pasar baru untuk produk-produk lokal (cinderamata; makanan; kesenian; keunikan)
- Memperbaiki infrastruktur dan pelayanan serta fasilitas masyarakat
- Alih ilmu, pengetahuan dan teknologi
- Kepedulian dan proteksi terhadap lingkungan
- Pendidikan dan mobilitas sosial
- Menumbuhkan kreativitas

Secara ringkas pengembangan pariwisata harus dapat memberikan dukungan terhadap upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan terhadap kebebasan untuk memilih bidang kehidupan yang dikehendaki dan tumbuhnya kesempatan kerja serta perlindungan dan perbaikan lingkungan.

Salah aspek bahasan yang dapat memberi kontribusi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah Ekowisata yang merupakan salah satu bentuk dari wisata minat khusus (special interest). Read (1980) menyatakan bahwa wisata minat khusus merupakan bentuk perjalanan dimana wisatawan mengunjungi suatu destinasi karena memiliki kekhususan yang sesuai dengan minatnya. Ditinjau dari aspek kekhususan kegiatan pariwisata tersebut dapat diasumsikan bahwa bentuk dari wisata minat khusus menekankan pada:

- Motivasi pencarian sesuatu yang unik dan baru untuk memperoleh pengalaman baru, seperti introspeksi serta berkomunikasi dengan kelompok masyarakat lain;
- Motivasi pencarian pada pengalaman wisata yang berkualitas dan yang memiliki nilai pelestarian terhadap sumberdaya yang digunakan;
- Memperluas wawasan dan kreativitas

Konsekuensinya, penyelenggara wisata minat khusus harus dapat menyajikan atraksi yang unik dan berkualitas yang mencakup atraksi itu sendiri maupun sarana pendukung pariwisata lainnya yang berbasis pada prinsip berkelanjutan. Bentuk wisata minat khusus diantaranya wisata peninggalan (heritage tourism), wisata alam, dan atau special event. Salah satu bentuk dari special event adalah seni pertunjukan, yaitu karya dan atau kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi dan dapat ditonton serta dinikmati. Zeppel dan Hall (1992) mengkategorikan seni pertunjukan sebagai heritage tourism, yaitu bagian dari pariwisata budaya yang menceritakan secara ringkas kepada pengunjung tentang pentingnya motivasi budaya, semacam karya wisata, seni pertunjukan, perjalanan budaya, festival, cerita rakyat dan peristiwa budaya lainnya.

Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, daerah-daerah desa-desa di Nusantara yang memiliki keunikan atau potensi untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata

perlu secara aktif menciptakan kegiatan wisata yang mengandung kepedulian terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat setempat. Tujuan-tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau mempertinggi PAD, harus diselaraskan dengan tujuan-tujuan pelestarian, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Seminar Nasional dengan Tema Pengembangan Pariwisata yang Berkaitan: Inovasi, Teknologi dan Kearifan Lokal pada 13 Desember 2018 di FISIP Universitas Jember membahas kepariwisataan dari berbagai aspek, baik yang berbasis pada teoritis maupun praktis. Bahasan yang dihasilkan jika diringkas menghasilkan pemikiran bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan inovasi, kreativitas teknologi, dan kearifan lokal sebagai basis dari pelibatan masyarakat lokal dan pelestarian aset kepariwisataan. Tindakan konkrit yang diperlukan dalam upaya mendukung pelestarian sumber-sumber dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, adalah:

- a. Menghindari penggunaan lahan-lahan pertanian maupun perkebunan produktif dan kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan fasilitas wisata (hotel; restoran)
- b. Memanfaatkan lokasi alamiah untuk pengembangan wisata pendidikan pelestarian lingkungan (alam; budaya; peninggalan; seni dan tradisi masyarakat setempat)
- c. Memanfaatkan peralatan tradisi dan melibatkan masyarakat setempat (pakaian; keramahtamahan; perilaku; tungku arang/kayu; interior; dekor kayu)
- d. Memperkokoh budaya pelayanan—ramah, peduli dan inovatif
- e. Partisipasi aktif terhadap program-program pelestarian lingkungan
- f. Kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya pengelolaan lahan yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan.

Jember, 11 Januari 2019

Tim Prosiding



DAFTAR ISI

Pertunjukan Tari Klasik Tradisional Gaya Yogyakarta sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Keraton Yogyakarta (Adhiningasih Prabhawati, Sri Wahjuni)	1
Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Boom Banyuwangi (Alim Marta Dinata, Anastasia Murdyastuti, Abdul Kholiq Azhari)	19
Strategi Pengembangan Pariwisata Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi (Anastasia Murdyastuti)	35
Proses Kebijakan Kepariwisata Berkelanjutan di Banyuwangi (Edy Wahyudi)	47
Sistem Pariwisata Pedesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Florentinus Nugro Hardianto)	65
Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi (Galih Wicaksono, Yeni Puspita)	77
Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat (I Ketut Mastika)	89
Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013 – 2017 dari Sektor Pariwisata di Banyuwangi (Indra Perdana Wibisono)	101
Pengembangan Potensi Desa Wisata Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Berdasarkan Analisis 4A: Attraction, Accessibility, Amenities dan Ancillary Service (Margaretta Andini Nugroho, Rebecha Prananta)	123
Pengembangan Sumber Daya Manusia secara Prespektif Potensi Wisata Daerah Religi ke Wisata Daerah Berkembang Bukit Pecaron Situbondo Jawa Timur (Mochamad Edoward Ramadhan, Dedi Dwilaksana, Suhartono, Djoko Poernomo)	135
Strategi Penguatan Entrepreneur Marketing pada Industri Tenun Ikat Bandar Kidul di Era Ekonomi Kreatif Indonesia (Novi Haryati, Rokhani, Choiria Anggraini, Moch. Adi Surahman)	147
Pengembangan Komunitas Berbasis Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Desa Wisata (Nur Kholis, Muhammad Ananda Egy)	161
Pengembangan Desa Wisata melalui Pembudidayaan Ikan Nila (Pairan, Muhammad Via Pratama)	173
Pluralisme dan Wisata Alam sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Wisata Kebangsaan Wonorejo Situbondo (Pramesi Lokaprasidha)	191
Pariwisata Berbasis Hutan Mangrove (Purwowibowo, Budhy Santoso)	205

Studi Korelasi Pengembangan Destinasi Wisata Alam Taman Borneo Samarinda dengan Konservasi Lingkungan (Rinto Dwiatmojo, Rini Koen Iswandari)	217
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Pendukung Industri Pariwisata Indonesia (Sri Yuniati, Djoko Susilo)	231
Branding dan Strategi Pemasaran: Perbandingan Beberapa Studi Kasus Pemasaran Daerah Tujuan Wisata (Sunardi Purwaatmoko, Syech Haryono, Adhiningasih Prabhawati)	243
Analisis Distribusi dan Tujuan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (Studi pada Batam, Bali dan DKI Jakarta) (Supriono)	259
Dampak Pengembangan Destinasi Wisata terhadap Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus Area Wisata Pulo Merah Kabupaten Banyuwangi (Vistario Febrian Yoseph, Supranoto, Agus Suharsono)	273



**PENGARUH JUMLAH WISATAWAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**Galih Wicaksono¹, Yeni Puspita²

galih.fisip@unej.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jumlah wisatawan dan pajak hotel dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder serta metode regresi linear berganda. Variabel pada penelitian ini terdapat dua variabel independen, yaitu jumlah wisatawan dan pajak hotel, sedangkan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara parsial dan simultan, jumlah wisatawan dan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Jumlah Wisatawan, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This study aims to determine that the number of tourists and hotel tax revenue affect revenue in the Banyuwangi City from 2014 to 2016. The type of data used in this study is secondary data and multi regression analysis method. Variables used in this study are independent variables, namely the number of tourists and hotel tax revenue, while the dependent variable is revenue. The result of this study is confirm that partially and simultaneously, if the number of tourists and hotel tax revenue have significant influence to revenue.

Keywords: Number of Tourists, Hotel Tax Revenue, Revenue

^{1,2} Dosen Universitas Jember

Pendahuluan

Otonomi Daerah diberlakukan di Indonesia sejak 2001, hal ini membuat daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian wewenang terhadap daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum berupa Undang Undang. Sebagai landasan hukum yang merupakan dasar hukum pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang Undang No 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010. Dalam Upaya merealisasikan Pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan yang lainnya.

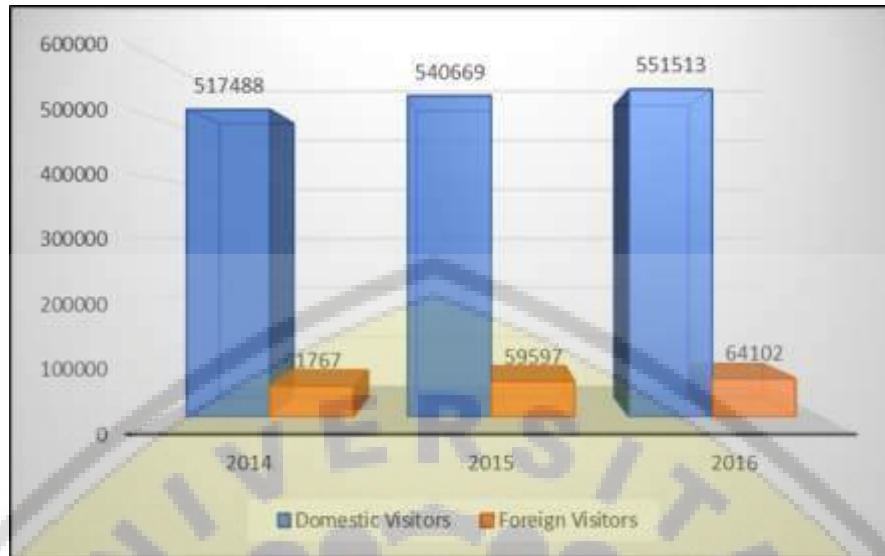
Kabupaten Banyuwangi adalah daerah yang saat ini lagi menggiatkan pariwisata. Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi, dimana sektor ini banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang mendongkrak Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan data Badan Pusat Statistik tercatat pendapatan per kapita Banyuwangi melonjak 62 persen dari Rp20,8 juta (2010) menjadi Rp37,53 juta (2015) dan diprediksi pendapatan per kapita pada tahun 2016 bisa menembus Rp38 juta per tahun, bahkan pendapatan per kapita Kota Blambangan itu sudah berhasil melampaui sejumlah kabupaten/kota di Jatim yang sebelumnya selalu di atas Banyuwangi. PDRB mengalami kenaikan hampir 75%, sektor restoran mengalami kenaikan 12% dan Hotel mengalami kenaikan 18%, dimana kenaikannya

melampaui rata rata pertumbuhan ekonomi Banyuwangi yang sebesar 7%.

Geliat bisnis dan pariwisata juga tercermin dari lonjakan penumpang di Bandara Blimbingsari Banyuwangi yang mencapai 1.31% dari hanya 7.826 penumpang pada tahun 2011 menjadi 110.234 penumpang di tahun 2015. Semakin berkembang pesatnya sektor pariwisata. Hal ini berdampak pula pada jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah ini, kunjungan wisatawan tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dan menunjukkan tren yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan, dan dengan semakin beragamnya festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, hal ini menjadi faktor pendukung kunjungan wisatawan ke Banyuwangi.

Meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara seperti terlihat pada Tabel 1, berdampak pada pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, khususnya penerimaan pajak restoran dan pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011, dimana objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan hotel, termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Objek pajak hotel meliputi hotel, motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos yang kamarnya lebih dari sepuluh kamar, serta rumah penginapan.

Gambar 1.
Jumlah Wisatawan di Banyuwangi



Sumber: Banyuwangi dalam Angka (2017)

Sesuai RPJMD Banyuwangi tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menargetkan jumlah pengunjung atau wisatawan dari dalam dan luar negeri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, target wisatawan tahun 2017 sebesar 13 juta wisatawan asing, dan 263 juta wisatawan domestik. Hal ini menjadi modal besar

bagi penerimaan daerah Kabupaten Banyuwangi. Seperti pada Tabel 1 terlihat bahwa penerimaan pajak hotel setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan, dan memberikan kontribusi yang besar terhadap Penerimaan Asli daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Hotel dan PAD Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Penerimaan Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah
2013	736.117.819	183.024.155.839
2014	960.514.090	275.918.234.423
2015	3.367.954.736	346.712.332.423
2016	4.980.913.655	367.939.934.394
2017	5.656.590.953	389.007.903.129

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2017)

Dalam penelitian Leksmana (2013) bahwa pariwisata memberikan dampak positif terhadap perekonomian seperti peningkatan pendapatan masyarakat daerah dan negara tujuan wisata, membuat lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah tujuan wisata. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat terjadi karena pengeluaran oleh

wisatawan untuk konsumsi, akomodasi, transportasi, souvenir dan jasa-jasa lainnya di daerah tujuan wisata akan menciptakan multiplier effects bagi sektor-sektor perekonomian lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ronald Bua Toding (2016), menunjukkan bahwa potensi sangat besar jauh di atas nilai realisasi penerimaan pajak hotel, peningkatan sosialisasi kepada wajib

pajak usaha perhotelan serta bertindak tegas kepada wajib pajak dan bila memungkinkan, sediakan fasilitas yang memudahkan para pemilik hotel untuk menyetorkan pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu, peneliti ingin menganalisa seberapa besar pengaruh jumlah wisatawan dan penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Banyuwangi, sehingga selain dapat menghitung pengaruhnya, juga dapat merumuskan kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Banyuwangi ?
3. Bagaimana pengaruh kunjungan wisatawan dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kunjungan wisatawan terhadap PAD Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh kunjungan wisatawan dan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Banyuwangi.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Otonomi Daerah

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi PAD.

Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah (Prakosa, 2005).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD. Menurut Mardiasmo (2002) "Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Adapun sumber-sumber PAD sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Hasil pajak daerah, pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak

daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya;
- 4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik;

2. Hasil retribusi daerah, sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Metodologi Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyuwangi serta dari Banyuwangi dalam Angka. Rincian data dalam penelitian ini meliputi data jumlah wisatawan dalam negeri dan luar negeri, realisasi pajak hotel, serta realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2014 sampai dengan 2016.

Variabel Penelitian

Variabel dependen atau terikat pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Menurut Samudera (2003), pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber

pendapatan asli yang digali dan dihasilkan oleh daerah, serta merupakan pendapatan daerah yang sah. Variabel independen atau tergantung pada penelitian ini adalah jumlah wisatawan dan pajak hotel. Jumlah wisatawan adalah keseluruhan jumlah pengunjung wisatawan, baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung di suatu daerah (Aliandi, 2013). Sedangkan pajak hotel adalah total penerimaan yang berasal dari pajak yang bersumber dari hotel, kos-kosan, dan penginapan yang dikenakan sebagai wajib pajak hotel.

Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan pengujian statistik. Tahapan pengujian dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya menggunakan uji koefisien determinasi, serta uji T dan uji F dalam analisis statistik.

Hasil Analisis dan Pembahasan

a. Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Wisatawan	36	21656	38908	60564	49523,22	5084,125
Pajak_Hotel	36	410064427	61343152	471407579	267531550,39	171528926,807
PAD	36	17165312274	15252012987	32417325261	26220430150,03	6347822409,724
Valid N (listwise)	36					

Sumber : Data diolah untuk penelitian (2018)

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah sampel adalah 36. Untuk variabel jumlah wisatawan, angka minimum sebesar 38.908 pengunjung, nilai maksimum sebesar 60.564 pengunjung, serta rata-rata pengunjung sebesar 49.523,22 pengunjung. Untuk variabel pajak hotel, angka minimum sebesar Rp

61.343.152, angka maksimum sebesar Rp 471.407.579, serta rata-rata sebesar Rp 267.531.550,39. Untuk variabel pendapatan asli daerah, angka minimum sebesar Rp 15.252.012.987, angka maksimum sebesar Rp 32.417.325.261, serta rata-rata sebesar Rp 26.220.430.150,03.

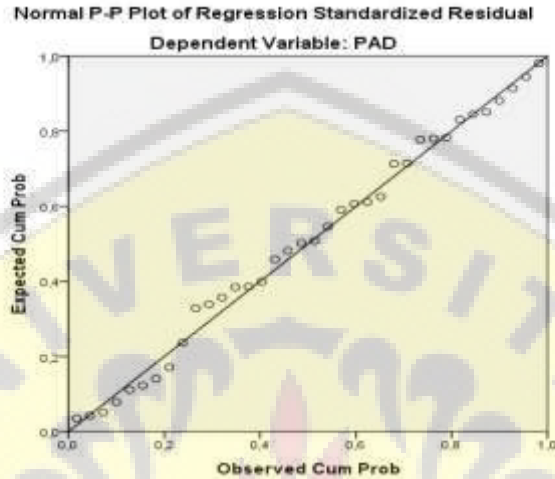
b. Hasil Pengujian Statistik

1. Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi, residual telah berdistribusi secara normal. Uji

normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik normal p-plot, serta uji kolmogorov smirnov (Uji KS).

Gambar 2. Grafik Normal P-Plot



Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara diagonal mendekati garis lurus. Menurut Ghozali (2013), jika data menyebar disekitar garis diagonal

menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3. Uji Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual	
N		36	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000009	
	Std. Deviation	2302404072,94146250	
Most Extreme Differences	Absolute	,074	
	Positive	,061	
	Negative	-,074	
Kolmogorov-Smirnov Z		,442	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,990	
	Sig.	,981 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)		,977	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,977
		Upper Bound	,984

Sumber : Data diolah untuk penelitian (2018)

Pada hasil Tabel 3, kolmogorov smirnov z yaitu 0,442 dengan nilai signifikansi jauh di atas 0,05, maka

dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini telah terdistribusi secara

normal. Hasil ini konsisten dengan pengamatan grafik normal p-plot.

2. Uji Multikolinieritas

Diperlukan untuk melihat ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan independen yang lain dalam suatu

model. Uji multikolinieritas melihat pada tolerance dan VIF, dengan pedoman bahwa apabila nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 , serta nilai VIF tidak lebih dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari multikolinieritas.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	6922571892,557	4168428985,954		1,661	,106		
Jumlah_Wisatawan	223061,157	89682,275	,179	2,487	,018	,773	1,294
Pajak_Hotel	30,842	2,658	,833	11,603	,000	,773	1,294

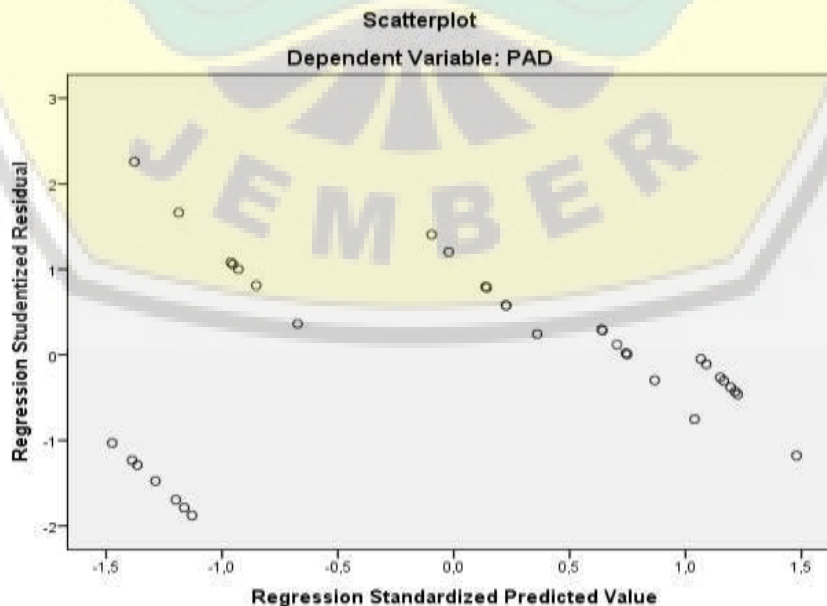
a. Dependent Variable: PAD
 Sumber : Data diolah untuk penelitian (2018)

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa nilai tolerance semua variabel di atas 0,1 serta VIF kurang dari 10, yaitu setiap variabel bebas dari multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk mendeteksi adalah dengan cara melihat grafik scatterplot sebagai berikut:

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dari heteroskedastisitas.

4. Uji t

Bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berikut adalah hasil perhitungan Uji T :

Tabel 5. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6922571893	4168428986		1,661	,106
Jumlah_Wisatawan	223061,157	89682,275	,179	2,487	,018
Pajak_Hotel	30,842	2,658	,833	11,603	,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data diolah untuk penelitian (2018)

Pada Gambar 5, dapat diketahui signifikansi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada variabel jumlah wisatawan dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05, sehingga kita ketahuijika jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Lebih lanjut, pada variabel pajak hotel diketahui bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga kita ketahu bahwa

pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

5. Uji F

Bertujuan untuk menguji signifikansi antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berikut adalah hasil perhitungan Uji F :

Tabel 6. Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1224782469060 184200000,000	2	6123912345300 92100000,000	108,921	,000 ^b
Residual	1855372580284 10770000,000	33	5622341152376 083500,000		
Total	1410319727088 595000000,000	35			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pajak_Hotel, Jumlah_Wisatawan

Sumber : Data diolah (2018)

Melihat pada Tabel 6, nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan dan pajak hotel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, bahwa jumlah wisatawan dan pajak hotel apabila semakin meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penilaian dapat dilakukan dengan cara melihat dari nilai Adjusted R Square.

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,932 ^a	,868	,860	2371147644,576

a. Predictors: (Constant), Pajak_Hotel, Jumlah_Wisatawan

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data diolah untuk penelitian (2018)

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,860. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah wisatawan dan pajak hotel berpengaruh sebesar 86 % terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya sebesar 14 % dipengaruhi faktor lain diluar variabel yang diajukan pada penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada hasil uji statistik dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dilihat dari Uji T yang menghasilkan signifikansi sebesar 0,18. Angka signifikansi 0,18 lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung sebesar 2,487 menunjukkan arah positif. Dengan kata lain, bahwa kenaikan jumlah wisatawan akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan apabila adanya wisatawan, maka tentu saja para

wisatawan akan menggunakan fasilitas yang ada di Kabupaten Banyuwangi, misalkan seperti hotel, restoran, dan parkir. Dengan adanya beberapa pemanfaatan oleh wisatawan atas beberapa hal tersebut, tentu saja akan meningkatkan perekonomian warga, serta diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah. Karena jumlah destinasi di Banyuwangi sangat menarik wisatawan untuk berkunjung, jadi tidak hanya ketika ada festival budaya, sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mufti Baihaqi (2017) yang mengangkat topik di jumlah kunjungan wisatawan di NTB dimana hasilnya menemukan bahwa variable jumlah wisatawan berpengaruh pada peningkatan PAD, karena jumlah wisatawan di NTB mengindikasikan semakin besar kegiatan konsumtif dari para wisatawan yang berkunjung di NTB.

Pengaruh Jumlah Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada hasil uji statistik dapat diketahui bahwa jumlah pajak hotel berpengaruh signifikan dan positif

terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dilihat dari Uji T yang menghasilkan signifikansi sebesar 0,00. Angka signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung sebesar 11,603 menunjukkan arah positif. Dengan kata lain, bahwa kenaikan jumlah pajak hotel akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan apabila adanya kas masuk yang berasal dari pajak hotel, tentu saja akan meningkatkan penerimaan pajak hotel, serta akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebaliknya, apabila penerimaan pajak hotel menurun, tentu saja akan menyebabkan turunnya pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ronald Bua Toding (2016) menemukan bahwa potensi sangat besar jauh di atas nilai realisasi penerimaan pajak hotel, dan penerimaan pajak hotel sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan PAD, peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak usaha perhotelan serta bertindak tegas kepada wajib pajak dan bila memungkinkan, sediakan fasilitas yang memudahkan para pemilik hotel untuk menyetorkan pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Andre (2014) menemukan bahwa jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel. Dikarenakan adanya peningkatan pembangunan hotel di Kota Palembang yang cukup meningkat di setiap tahunnya dikarenakan adanya event-event / pentas yang bersifat nasional dan internasional pada tahun 2011 yaitu Sea Games.

Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pada hasil uji statistik dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan dan pajak hotel secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dilihat dari Uji F yang menghasilkan signifikansi sebesar 0,00. Angka signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nilai f hitung sebesar 108,921 menunjukkan arah positif. Dengan kata lain, bahwa kenaikan jumlah wisatawan dan jumlah pajak hotel, akan meningkatkan pula angka pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan apabila adanya wisatawan dan naiknya pajak hotel, tentu saja hal tersebut menyebabkan naiknya pendapatan asli daerah. Namun apabila jumlah wisatawan dan pajak hotel berkurang, maka tentu saja hal tersebut akan mengakibatkan turunnya pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Tiara, (2013) menemukan bahwa Hubungan jumlah hotel dan tingkat okupansi menjadi indikasi penerimaan pajak hotel, akan tetapi jumlah wisatawan belum tentu menjadi tolak ukur terhadap penerimaan pajak hotel dikarenakan wisatawan yang berkunjung di Kota Semarang hanya untuk sekedar transit. Hal ini dibuktikan rata-rata lama hunian maksimal hanya 1.7 hari.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial, jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Secara parsial, pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
3. Secara simultan, jumlah wisatawan dan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dimana pengaruhnya yaitu sebesar 86 %. Sisanya sebesar 14 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, hendaknya selalu berusaha meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi, misalkan dengan cara membuat acara-acara yang menarik dan kreatif, sehingga berpotensi mendatangkan wisatawan.
2. Untuk Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi, hendaknya berusaha meningkatkan jumlah pajak hotel, misalkan dengan cara melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, serta pemetaan potensi pajak hotel secara akurat dan cermat.
3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya diteliti lebih lanjut terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sehingga akan ditemukan suatu formula secara lebih detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Daftar Pustaka

Aliandi, Vidya Dwi Anggitasari, dkk. 2013. Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan

Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel Studi Kasus Pada Kota Yogyakarta. *Diponegoro Journal of Economics*, Vol 02, No 04. Semarang : Universitas Diponegoro.

Banyuwangi dalam Angka. 2016.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2016. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi nomor 81 tahun 2016 tentang pembayaran dan pelaporan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara elektronik

Prakosa .2005. Pajak dan retribusi Daerah, Yogyakarta. UII Press

Ronald Bua Toding. 2016. Analisis potensi dan Efektivitas pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal EMBA* Vol 4 No 1 Maret 2016

Samudera. 2003. Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II. Prima No.4. Jakarta : LP3ES.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.